

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Eskalasi keamanan global pada Perang Dingin membuat negara lain turut terkena imbas. Meskipun tidak terlibat dalam konflik Perang Dingin, namun Tiongkok ikut dihadapkan pada ancaman senjata nuklir. Munculnya ancaman dari eksternal turut mengubah persepsi negara terhadap keamanan militernya. Kerugian besar yang dialami pada masa Perang Korea dan ancaman serangan nuklir yang dilayangkan Amerika Serikat memaksa Mao, selaku pemimpin Tiongkok saat itu untuk mengubah kebijakan pertahanannya, dari menghindari penggunaan senjata nuklir menjadi produsen senjata nuklir. Mao yang memimpin Tiongkok saat itu mengubah kebijakannya yang semula tidak berniat mempersenjatai Tiongkok dengan nuklir menjadi memiliki nuklir. Perubahan ini merupakan respon pemerintah Tiongkok atas ancaman militer dari eksternal berupa serangan nuklir yang saat itu mengintai Tiongkok.

Sejak uji coba nuklir pertama kali, Tiongkok sadar kebijakannya akan mendapat perhatian serius dari internasional. Maka dari itu, pemerintah Tiongkok merilis pernyataan resmi yang menegaskan tujuan pembangunan senjata nuklir adalah untuk pertahanan diri (*deterrence*) dari ancaman dan serangan musuh. Senjata nuklir tersebut tidak akan digunakan sama sekali untuk memulai perang (*No First Use*) karena mereka sadar potensi kerugian yang ditanggung oleh rakyat lebih besar dibandingkan dengan keuntungan kemenangan mereka yang diterima.

Pada tahun-tahun awal perkembangannya, jumlah hulu ledak Tiongkok juga tidak bertambah signifikan. Kebijakan awal senjata nuklir Tiongkok tersebut merupakan pilihan yang rasional karena pada masa tersebut para pemimpin Tiongkok tidak memprioritaskan bidang senjata nuklir dalam strategi nasionalnya. Perekonomian yang belum mapan membuat otoritas Tiongkok memilih untuk mengalokasikan dana yang dapat mereka gunakan untuk berperang kepada

investasi pengembangan senjata nuklir yang ditujukan untuk pencegahan (*deterrence*).

Pada tahun 2012, Xi Jinping terpilih menjadi pemimpin baru Tiongkok. Ia memiliki misi untuk mengembalikan kejayaan Tiongkok dalam berbagai aspek dengan melakukan pembaruan baru bangsa Tiongkok di bawah slogan *Chinese Dream*. Pada aspek militer, Xi Jinping melakukan pembaruan dengan merilis dokumen Buku Putih pertahanan tahun 2015. Dalam dokumen tersebut Tiongkok menyatakan akan selalu memegang prinsip *No First Use* terhadap senjata nuklirnya dan tidak akan menggunakan nuklirnya untuk mengancam negara non-nuklir. Tiongkok juga mengadopsi kebijakan baru berupa pengembangan sistem peringatan dini nuklir untuk menyelaraskan kekuatannya dengan Rusia dan Amerika Serikat. Namun, keputusan *deterrence* seperti ini dianggap tidak tepat untuk diterapkan pada masa damai karena dapat menimbulkan kecurigaan negara lain dan memanasakan hubungan politik Tiongkok dengan rivalnya.

Meskipun demikian, Tiongkok tetap membangun pertahanannya untuk mencegah serangan karena kebangkitannya saat ini terus mendapat tekanan dari negara besar bersenjata nuklir lainnya, seperti Amerika Serikat. Perubahan kebijakan keamanan strategis dan pertahanan nasional Amerika Serikat menimbulkan dilema bagi keamanan Tiongkok. Isu keamanan yang semakin kompleks membuat pilihan untuk terus membangun pertahanan nuklir menjadi keputusan yang paling menguntungkan Tiongkok untuk merespon perubahan ini dibandingkan menjadi ofensif. Seperti pada paragraf sebelumnya, keputusan ini merupakan pilihan yang rasional. Tiongkok sadar keuntungan yang akan didapatkan dari kemenangan perang tidak sebanding dengan harga dan nyawa rakyat yang harus dikorbankan mengingat lawannya merupakan kekuatan besar.

Amerika Serikat selalu menjadi acuan Tiongkok terhadap kebijakan senjata nuklirnya. Meskipun jarak geografi keduanya cukup jauh, namun perkembangan teknologi dan faktor sejarah mempengaruhi persepsi ancaman keamanan militer Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Inovasi teknologi senjata konvensional yang saat ini lebih presisi dapat menyasar gudang nuklir mereka. Pengalaman terlibat

dalam konflik besar juga membuat Tiongkok menganggap Amerika Serikat masih memiliki niatan untuk menantang kebangkitannya.

Amerika Serikat memandang setiap peningkatan kapabilitas pertahanan Tiongkok akan menurunkan keamanan nasionalnya, begitu pula sebaliknya dengan Tiongkok yang merasa keamanan militernya terancam setelah Amerika Serikat merilis *National Defense Strategy 2017* dan *National Security Strategy 2018*. Dalam merespon perubahan ini, penguatan militer Tiongkok berupa modernisasi persenjataan nuklir merupakan upaya pertahanan diri dari serangan nuklir Amerika Serikat selaku ancaman paling potensialnya.

Perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan strategis Amerika Serikat pada 2017 dan 2018 memaksa Tiongkok di masa kepemimpinan Xi Jinping untuk ikut mengubah kebijakan pertahanannya. Tiongkok merilis Buku Putih pertahanan terbaru pada 2019. Terdapat perubahan kebijakan antara Buku Putih 2015 dengan 2019, yaitu dalam hal transparansi kebijakan senjata nuklir. Dalam Buku Putih 2015 disebutkan bahwa Tiongkok akan mengkombinasikan senjata nuklir dan konvensional sebagai wujud implementasi strategi *lean and effective* serta untuk meningkatkan kapabilitas mereka. Sedangkan dalam Buku Putih 2019 tidak ada kalimat yang menyatakan strategi seperti ini secara eksplisit. Langkah ini merupakan bagian dari kehati-hatian Tiongkok dalam membaca persepsi musuh terhadapnya. Kondisi dilema dan isu keamanan persenjataan nuklir yang semakin kompleks membuat tindakan yang terlalu transparan dapat membahayakan kapasitas senjata nuklir Tiongkok yang rendah.

Sejak awal pembangunannya, Tiongkok terbukti tidak pernah menggunakan senjata nuklirnya untuk menyerang atau mengancam negara manapun. Hal ini membuktikan senjata nuklir memang alat pencegahan dan pertahanan dari serangan. Salah satu prinsip dalam teori *deterrence* adalah negara harus tetap meningkatkan alat pertahanannya meskipun ia yakin alat tersebut tidak akan digunakan. Prinsip inilah yang diberlakukan oleh Tiongkok pada masa kepemimpinan Xi Jinping, terutama periode 2017 – 2019. Tiongkok saat ini tengah mengejar cita-cita *Chinese Dream*-nya, sedangkan ia tidak memiliki pengetahuan mengenai persepsi musuh terhadapnya, sehingga solusinya adalah ia harus

meningkatkan kekuatan militer agar mapan dan siaga terhadap berbagai kemungkinan serangan nuklir.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi dari prinsip *No First Use* pada masa Xi Jinping 2017 – 2019 disesuaikan dengan misi dari slogan *Chinese Dream*. Prinsip *No First Use* terus diterapkan secara konsisten pada kebijakan senjata nuklir Tiongkok 2017 – 2019 sementara misi untuk menguatkan militer Tiongkok agar menjadi kekuatan besar terus dilakukan. Ini merupakan keunikan dari pengembangan senjata nuklir pada masa Xi Jinping, yaitu masih namun tetap berada di prinsip-prinsip perdamaian untuk mencapai kondisi dunia yang harmoni sesuai tradisi budaya Tiongkok. Harmonisasi tersebut dilakukan dengan meniadakan strategi untuk mengkombinasikan senjata nuklir dan konvensional. Keputusan ini setidaknya dapat menurunkan kekhawatiran dunia terhadap nuklir Tiongkok.

Kekhawatiran dunia terhadap nuklir Tiongkok sebenarnya merupakan cerminan dari dominasi dan hegemoni negara Barat. Meningkatnya produksi dan aktivitas nuklir dipandang membahayakan karena Tiongkok dan ideologinya tidak sejalan dengan negara Barat serta tatanan nilai-nilainya yang diterapkan di dunia selama ini. Persaingan tersebut menimbulkan pandangan bahwa nuklir Tiongkok adalah ancaman global dibandingkan nuklir Amerika Serikat yang jumlahnya jauh lebih besar.

Tujuan peningkatan aktivitas senjata nuklir Tiongkok di masa Xi Jinping 2017 – 2019 utamanya adalah untuk mempertahankan diri dari negara musuhnya. Militer yang kuat dan pertahanan pencegahan (*deterrence*) nuklir yang besar akan mempermudah proses kebangkitan bangsa Tiongkok. Kapabilitas nuklir Tiongkok tidak akan melampaui Amerika Serikat karena Tiongkok menerapkan strategi pertahanan minimum. Jumlah cadangan nuklir akan disesuaikan dengan batas minimum pertahanan nasional. Hal ini membuat strategi pertahanan Tiongkok termasuk dalam kategori *basic deterrence*. Pembangunan nuklir bukan untuk menghancurkan musuh, melainkan agar Tiongkok tidak dikalahkan oleh lawannya.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan nuklir Tiongkok di masa kepemimpinan Xi Jinping mengalami kendala berupa benturan antara kepentingan pertahanan nasional Tiongkok dengan respon pihak internasional. Dominasi nilai-nilai Barat di dunia membuat peningkatan militer Tiongkok dipandang sebagai ancaman keamanan internasional. Padahal di dalam agenda militernya Tiongkok memasukkan nilai-nilai perdamaian dan nilai perdamaian ini sudah menjadi asas fundamental sejak awal pengembangan senjata nuklir.

Melihat benturan persepsi tersebut, saran praktis dari penelitian ini adalah pemerintah Tiongkok harus lebih transparan terhadap persenjataan nuklirnya. Transparan dalam hal ini adalah dengan merilis pernyataan resmi bahwa kapasitas senjata nuklir Tiongkok tidak melebihi negara nuklir terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat atau Rusia. Tiongkok juga sebaiknya menurunkan agresivitas militer serta berbagai tindakan supremasi hukum lainnya dengan negara tetangga, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan sebab tindakan ini kontradiktif dengan nilai-nilai perdamaian dalam *Chinese Dream*. Penurunan tensi militer di kawasan Laut Cina Selatan juga dapat menurunkan pransangka bahwa Tiongkok akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang musuhnya dikemudian hari.

### 6.2.2 Saran Teoritis

Penulis berpendapat bahwa penggunaan teori *deterrence*, konsep keamanan militer, serta konsep dilema keamanan dalam penelitian ini sudah cukup untuk menganalisa bagaimana implementasi dari kebijakan senjata nuklir Tiongkok, khususnya pada prinsip *No First Use* di masa kepemimpinan Xi Jinping 2017 – 2019. Ketiga teori dan konsep tersebut dapat menjawab implementasi seperti apa yang membedakan kebijakan Xi Jinping dengan pemimpin lainnya.

Topik penelitian mengenai implementasi prinsip *No First Use* atau seputar kebijakan nuklir Tiongkok dapat diperluas lagi menggunakan konsep lain, seperti *framing*. Konsep ini dapat menghadirkan sudut pandang lain dari kebijakan Tiongkok serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penulis merasa penggunaan teori *deterrence*, konsep keamanan militer, serta konsep dilema keamanan dapat menjelaskan kebijakan Tiongkok dari sudut pandang kepentingan pertahanan. Sedangkan konsep *framing* dapat membantu penelitian selanjutnya dalam menjelaskan lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi oleh pemerintah Tiongkok dalam menjalankan agenda *Chinese Dream*-nya, termasuk dalam aspek penguatan pertahanan nuklir, melalui sudut pandang media massa.